

**INTERAKSI SISTEM PENGENDALIAN INTERN DENGAN FAKTOR-
FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN**



Diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

Ryan Chrisna Hadi
B200120066

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**“INTERAKSI SISTEM PENGENDALIAN INTERN DENGAN FAKTOR
FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN ”**

PUBLIKASI ILMIAH

Yang ditulis oleh :

RYAN CHRISNA HADI
B 200120066

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Dosen Pembimbing



(Dr. Zulfikar, SE, M.Si)

HALAMAN PENGESAHAN

**“INTERAKSI SISTEM PENGENDALIAN INTERN DENGAN FAKTOR-
FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN ”**

Yang ditulis oleh :

RYAN CHRISNA HADI
B 200120066

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 22 Oktober 2016
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan penguji :

1. Dr. Zulfikar, SE., M.Si

(Ketua Dewan Penguji)

2. Dr. Fatchan Achyani, SE., M.Si

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Eny Kusumawati, SE., MM., AK, CA

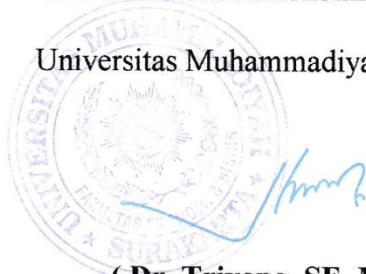
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, SE, M.Si)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 01 November 2016

Penulis



RYAN CHRISNA HADI
B20012066

INTERAKSI SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN

ABSTRAK

Berdasarkan laporan hasil dari Badan Pemeriksaan Keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun anggaran 2014 mendapatkan opini “Wajar Dengan Pengecualian”. Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (2) untuk menganalisis interaksi sistem pengendalian intern dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Obyek penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Klaten. Sampel penelitian sebanyak 54 responden dari 18 SKPD. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling*. Pengujian data dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas serta uji asumsi klasik yg digunakan adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolenearitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda, uji t, uji R² dan uji F.

Hasil penelitian Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Interaksi sistem pengendalian intern mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kata Kunci: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Kompetensi Staf Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Abstract

Based on the report of the Board of Audit of the financial statements Klaten regency government in fiscal year 2014 to get opinions "Fair With Exceptions". The purpose of this study were (1) To analyze the Effect of Implementation of the Government Accounting Standards, Financial Management, Accounting Staff Competence on the Quality of Local Government Finance Report. (2) To analyze interactions affect the Internal Control System Implementation of the Government Accounting Standards, Financial Management, Accounting Staff Competence on the Quality of Local Government Finance Report.

Object of this research is a Civil Servant Klaten regency government. The research sample of 54 respondents from 18 SKPD. Sempel retrieval

techniques using purposive sampling. The test data is done by testing the validity and reliability test and classical assumption in use is the normality test, heteroscedasticity, multikolenearitas test. Hypothesis testing using multiple regression analysis, t-test, R2 and F test

Research results Application of the Government Accounting Standards do not affect the quality of Government Financial Statements, Financial Management and Accounting Staff Competence affect the quality of Local Government Finance Report. Interactions affecting the internal control system of Financial Management and Accounting Staff Competence on the Quality of Local Government Finance Report.

Keywords: *government standard accountancy, financial management, competency of accounting staff, quality of financial statement, system of internal control*

1. PENDAHULUAN

Banyaknya kasus tentang buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi isu hangat yang perlu dikaji lebih dalam. Permasalahan ini dibuktikan dengan diperolehnya opini di beberapa instansi pemerintahan daerah yang ada di Indonesia. Opini diberikan terhadap laporan keuangan karena BPK mengalami kesulitan dalam menerapkan prosedur audit pada beberapa pos yang disajikan. Rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara umum disebabkan oleh penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum benar, kurangnya Kompetensi Staf Akuntansi yang ada serta penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern yang belum memadai.

Berdasarkan laporan hasil dari Badan Pemeriksaan Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah kabupaten Klaten pada tahun anggaran 2014 mendapatkan opini “Wajar Dengan Pengecualian”. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten telah disajikan secara wajar untuk semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Badan Pemeriksaan Keuangan juga menambahkan bahwa Sistem Pengendalian Intern di Pemerintahan Kabupaten Klaten belum terlalu kuat atau masih lemah. (*ppid.klatenkab.go.id*)

Faktor faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam penelitian ini yang pertama adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menjelaskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan diberlakukannya hal tersebut agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah.

Faktor yang kedua adalah Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Daerah, bahwa Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Faktor yang ketiga adalah Kompetensi Staf Akuntansi. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugas secara professional, efektif, dan efisien.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern, menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai tentang atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk (1) Untuk menganalisis pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (2) untuk menganalisis pengaruh interaksi Sistem Pengendalian Intern dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengelolaan Keuangan

Daerah, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Fikri (2015), yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada SKPD-SKPD di Pemprov. NTB).

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Data yang digunakan adalah data primer berupa jawaban kuesioner yang disebarkan peneliti di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang Bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. Sampel dalam penelitian adalah Pegawai Negeri Sipil yang menyusun laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten Klaten. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling dengan menetapkan kriteria tertentu yaitu pegawai yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan diantaranya adalah Kepala Sub Bagian Keuangan, Bendahara dan Staf Akuntansi.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data-data yang dibutuhkan melalui kuesioner yang disebarkan dengan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi orang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Pemberian skor dalam skala likert yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS).

Metode Analisis

Pengujian Instrumen

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Jika korelasi skor tiap-tiap item dengan skor total menunjukkan nilai signifikansi $< 0,05$, (Ghozali, 2012).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan koefisiensi *Cronbach Alpha* (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$ (Ghozali, 2012).

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini dengan menggunakan uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Test*. Jika pengujian menghasilkan nilai signifikansi (*p value*) $> 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa variabel pengganggu terdistribusi secara normal (Ghozali, 2012).

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji asumsi ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Salah satu cara yang dilakukan untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan metode *Gletser*. Uji *Gletser* dilakukan dengan tahap yaitu apabila nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolinieritas

Cara untuk mengetahui adanya multikolinearitas adalah dengan melakukan uji *VIF* (*Variance Inflation Factor*). Nilai *VIF* yang tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1. Maka model dapat dikatakan terbatas dari multikolinearitas. $VIF = 1/tolerance$, jika $VIF = 10$ maka $Tolerance = 1/10=0,1$. Semakin tinggi *VIF* maka semakin rendah *Tolerance*.

Pengujian hipotesis

Untuk menguji hipotesis peneliti menggunakan *Moderated Regression Analysis* yang merupakan aplikasi khusus regresi berganda linier. maka digunakan model *Moderated Regression Analysis (MRA)* dengan persamaan sebagai berikut ini.

$$KLKPD = a + b_1SAP + b_2PKD + b_3KSA + b_4SPI + b_5SAP*SPI + b_6PKD*SPI + b_7KSP*SPI + e$$

Keterangan:

KLKPD	: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
SAP	: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
PKD	: Pengelolaan Keuangan Daerah
KSA	: Kompetensi Staf Akuntansi
SPI	: Sistem Pengendalian Intern
A	: Konstanta
b ₁ - b ₇	: Koefisien Regresi
SAP*SPI	: Interaksi antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Pengendalian Intern
PKD*SPI	: Interaksi antara Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern
KSA*SPI	: Interaksi antara Kompetensi Staf Akuntansi dengan Sistem Pengendalian Intern
e	: error atau variabel pengganggu

Pengujian hipotesis juga menyertakan pengujian yang diantaranya adalah Uji Ststistik t, Uji Silmutan (F) dan Uji Koefisien Determinasi (R²).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4.1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SAP	52	31	48	41,08	4,669
PKD	52	19	35	28,65	3,130
KSA	52	16	30	24,58	2,630
KLKPD	52	25	40	32,67	3,098
SPI	52	20	32	27,17	2,792
Valid N (listwise)	52				

Sumber: Data primer diolah, 2016

Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4.2
Hasil Pengujian Normalitas

Variabel	Kolmogrov-Smirnov	P-value	Keterangan
Unstandardized Residual	0,563	0,909	Normal

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan hasil pengujian normalitas dengan melihat *Kolmogrov-Smirnov* terhadap data *Unstandardized Residual* adalah sebesar 0,909, dapat diketahui bahwa semua p-value untuk data ternyata lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat dinyatakan bahwa keseluruhan data yang diperoleh memiliki sebaran yang normal.

Pengujian Heteroskedastisitas

Tabel 4.3

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Variabel	T	Sig	Keterangan
SAP	0,264	0,793	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
PKD	1,088	0,282	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
KSA	0,239	0,812	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
SPI	-0,814	0,420	Tidak Terjadi Heterokedastisitas

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan pengujian heteroskendastisitas dengan melihat nilai signifikansi dari masing masing variabel adalah lebih besar dari 0,05 maka hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokendastisitas.

Pengujian Multikolineritas

Tabel 4.4
Hasil Pengujian Multikolineritas

Variabel	Toleranc e	VIF	Keterangan
SAP	0,628	1,592	Tidak Terjadi Multikolineritas
PKD	0,465	2,151	Tidak Terjadi Multikolineritas
KSA	0,645	1,550	Tidak Terjadi Multikolineritas
SPI	0,459	2,181	Tidak Terjadi Multikolineritas

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas pada table menunjukkan bahwa semua variabel memiliki tolerance lebih dari 0,1 dan memiliki nilai *VIF* kurang dari 10. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel sehingga model regresi ini tidak ada masalah multikolinieritas.

Pengujian Hipotesis

Analisis Linier Berganda

Tabel 4.5
Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda

Variabel	Coefficients	t_{hitung}	Sig	keterangan
(constant)	34,705	1,398	0,169	
SAP	-0,932	-1,039	0,305	H1 ditolak
PKD	-1,609	-2,431	0,016	H2 diterima
KSA	3,073	2,827	0,007	H3 diterima
SAP*SPI	0,040	1,191	0,240	H4 ditolak
PKD*SPI	0,074	2,802	0,038	H5 diterima
KSA*SPI	0,110	-2,635	0,012	H6 diterima
R = 0,783		F hitung = 9,984		
R Square = 0,614		Sig = 0,000		
Adjusted R ² = 0,552				

Sumber: Data primer diolah, 2016

Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya nilai konstanta dengan parameter positif sebesar 34,705. Hal ini menunjukkan hubungan yang searah antar variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Kompetensi Staf Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, artinya bahwa variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Kompetensi Staf Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Intern mengalami peningkatan maka akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan menunjukkan t_{hitung} -1,039 lebih kecil dari t_{tabel} -1,039 dengan nilai

signifikansi 0,305 lebih besar dari 0,05. Sehingga hipotesis pertama ditolak (H1 ditolak), sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fikri, Inapty, dan Martiningsih (2015) dengan hasil yang menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD-SKPD Pemprov. NTB

Hal ini berarti Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan belum dapat memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini mungkin disebabkan karena penerapannya belum konsisten dan menyeluruh di lingkungan pemerintahan daerah dikarenakan para pegawai yang belum sepenuhnya memahami tentang komponen-komponen penyusun laporan keuangan yang terkandung dalam standar akuntansi pemerintahan. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi di lingkungan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memperkenalkan atau memberikan penjelasan tentang standar akuntansi pemerintahan supaya diterapkan dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji t pada variabel Pengelolaan Keuangan Daerah menunjukkan t hitung -2,431 lebih besar dari t tabel -2,010 dengan nilai signifikansi 0,016 lebih kecil dari 0,05. Maka Hipotesis kedua diterima (H₂ diterima) Sehingga Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pedoman pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Jadi dengan adanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Begitu juga sebaliknya apabila pengelolaan keuangan daerah tidak berjalan dengan efisien dan efektif maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan menurunkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Megawati, Sulindawati, dan Sujana (2015) yang berhasil membuktikan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada tiga Dinas di Kabupaten Buleleng.

Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa Kompetensi Staf Akuntansi menunjukkan t_{hitung} 2,827 lebih besar dari t_{tabel} 2,010 dengan nilai signifikansi 0,007 lebih kecil dari 0,05. Sehingga hipotesis ketiga diterima (H_3 diterima) sehingga Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa kompetensi staf akuntansi yang baik, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin baik juga. Semakin tinggi tingkat kompetensi staf akuntansi maka akan semakin tinggi tingkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat kompetensi staf akuntansi maka akan semakin rendah tingkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kompetensi Staf Akuntansi merupakan salah satu faktor penting dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Walaupun sarana dan prasarana yang disediakan sangat canggih jika tidak didukung dengan kompetensi dan skill khusus oleh pegawai bagian akuntansi maka sarana dan prasarana itu tidak akan berfungsi dengan baik. Maka dari itu, sangat penting sekali adanya kompetensi dari staf akuntansi yang menyusun laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga nantinya pemerintah tidak khawatir lagi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dalam dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja atau eksistensi suatu organisasi dalam suatu periode. Hasil penelitian ini mendukung sesuai dengan hasil

penelitian yang dilakukan oleh Udiyanti, Atmadja, dan Darmawan (2014) yang berhasil membuktikan bahwa kompetensi staf akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sitepu, Sjahrudin, dan Idris (2014) yang berhasil membuktikan bahwa kompetensi aparatur teknik akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Makasar.

Interaksi Sistem Pengendalian Intern memperlemah hubungan antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan uji t interaksi sistem pengendalian intern tidak menunjukkan pengaruhnya dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa t_{hitung} 1,191 lebih kecil dari t_{tabel} 2,010 dengan nilai signifikansi 0,240 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis keempat ditolak (H_4 ditolak).

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fikri, Inapty, dan Martiningsih (2015) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak dapat memoderasi penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD-SKPD di Pemprov. NTB. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian intern belum terlalu efektif dan efisien dalam menenerapan standar akuntansi pemerintahan pada setiap SKPD-SKPD dilingkungan pemerintahan daerah. Faktor-faktor yang menyebabkan mungkin belum konsistennya penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada pegawai dilingkungan pemerintah daerah. Faktor lain yang menyebabkan sistem pengendalian intern tidak bisa mendukung hubungan penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan mungkin belum ada wewenang tentang penggunaan standar akuntansi pemerintahan sehingga penerapannya tidak berjalan dengan

baik dan tidak konsisten dalam penyusunan laporan keuangan sehingga hal ini dapat menurunkan kualitas laporan keuangan.

Interaksi Sistem Pengendalian Intern memperkuat hubungan antara Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa Interaksi Sistem Pengendalian Intern memperkuat hubungan antara Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hipotesis ini diterima karena hasil pengujian menunjukkan t_{hitung} 2,802 lebih besar dari t_{tabel} 2,010 dengan nilai signifikansi 0,038 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis kelima diterima (H_5 diterima).

Hal ini berarti bahwa sistem pengendalian intern berperan penting dalam proses pengawasan pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern mengontrol seluruh kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan laporan keuangan. Sehingga mekanisme pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang menunjukkan interaksi Sistem Pengendalian Intern dengan hubungan antara Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sejauh ini belum pernah dilakukan penelitian. Namun penelitian tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pernah dilakukan oleh Udiyanti, Atmadja, dan Darmawan (2014) menunjukkan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian dari Dewi, Sinarwati, dan Darmawan (2014) juga menunjukkan bahwa Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Jembrana..

Interaksi Sistem Pengendalian Intern memperkuat hubungan antara Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian uji t menunjukkan Interaksi Sistem Pengendalian Intern memperkuat hubungan antara Penerapan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hipotesis ini diterima karena hasil pengujian menunjukkan t_{hitung} -2,635 lebih besar dari t_{tabel} -2,010 dengan nilai signifikansi 0,012 lebih kecil dari 0,05. Sehingga Hipotesis keenam diterima (H_6 diterima).

Sistem pengendalian intern merupakan salah satu tolak ukur yang harus digencarkan pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan. Karena sistem pengendalian intern mampu membentuk struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan pemerintah daerah. Hal ini berarti Sistem pengendalian intern berperan penting dalam mengontrol kinerja dari staf akuntansi sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya sistem pengendalian intern maka akan ada otorisasi pemisahan tugas yang jelas. Staf akuntansi akan memiliki tugas dan wewenang tersendiri sesuai apa yang telah ditetapkan pada sistem pengendalian intern, sehingga tugas staf akuntansi akan jelas dan informasi informasi akan lebih akurat sehingga dapat meminimalisir adanya tindakan-tindakan yang tidak etis yang akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Udiyanti, Atmadja, dan Darmawan (2014) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Staf Akuntansi secara silmutan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD di Kabupaten Buleleng.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara statistik berpengaruh tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah secara statistik berpengaruh negatif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Kompetensi Staf Akuntansi secara statistik berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Interaksi Sistem Pengendalian Intern memperlemah hubungan antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
5. Interaksi Sistem Pengendalian Intern memperkuat hubungan antara Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
6. Interaksi Sistem Pengendalian Intern memperkuat hubungan antara Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, Daniel kartika dan Yohanes Suhardjo. 2013. “*Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual)*”. JURNAL STIE SEMARANG, Vol. 5, No. 3, Edisi Oktober 2013 (ISSN : 2252-7826)
- Dewi, Ni Made R K., et.al. 2014. “*Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada 10 Skpd Berupa Dinas di Kabupaten Jembrana)*.” e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol. 2 No.1 Tahun 2014).
- Fikri, M. Ali. Biana Adha Inapty dan Martiningsih. 2015” *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Skpd-Skpd di Pemprov. NTB)*” Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara, Medan 16-19 September 2015.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Cetakan IV. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Kusumah A.A. 2012. “ *Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan* (Survei pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya).

Megawati, Ni Luh Gede Sri, Sulindawati dan Edy Sujana. 2015. “*Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Tiga Dinas Kabupaten Buleleng)*”. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol. 3 No.1 Tahun 2015).

Peraturan Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang “Standar Akuntansi Pemerintahan”.

Udiyanti, Ni Luh Nyoman, Anantawikrama Tungga Atmadja, dan Nyoman Ari Surya Darmawan,. 2014” *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Buleleng)*” e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol. 2 No. 1 Tahun 2014).

Wiyono, Gendro. 2011. *Merancang Penelitian Bisnis dengan alat SPSS 17.0 & smart PLS 2.0*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

www.ppid.klatenkab.go.id